



Kebijakan Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai Instrumen Transformasi Ekonomi Pertanian Daerah di Kabupaten Landak

Anselmus Jepri^{1*}, Endang Solichin², Stepanus Marjoni³¹²³Agribisnis, Universitas Katolik Santo Agustinus HippoEmail: ¹anselmusjefry@gmail.com, ²e.solichin@sanagustin.ac.id, ^{3*}s.marjoni@sanagustin.ac.idEmail Penulis Korespondensi: ¹anselmusjefry@gmail.com, ²e.solichin@sanagustin.ac.id, ^{3*}s.marjoni@sanagustin.ac.id

Abstrak-Penelitian ini bertujuan merumuskan model penguatan kebijakan pengelolaan kelapa sawit berbasis keberlanjutan dalam mendukung transformasi ekonomi pertanian daerah di Kabupaten Landak. Sektor kelapa sawit memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, namun pengembangannya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain degradasi lingkungan, lemahnya tata kelola lahan, serta keterbatasan kapasitas petani kecil dalam mengakses kebijakan dan standar keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran dengan dominasi kuantitatif. Data dikumpulkan melalui survei terhadap pemangku kepentingan, wawancara terbatas, diskusi kelompok terfokus, serta analisis dokumen kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Landak masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara optimal dengan prinsip keberlanjutan. Kapasitas kelembagaan daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan, yang selanjutnya berdampak pada kinerja ekonomi pertanian. Model kebijakan yang diusulkan menekankan penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan lintas sektor, kolaborasi multipihak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Model ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kelapa sawit sekaligus mendorong transformasi ekonomi pertanian yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Kata Kunci: kebijakan publik; kelapa sawit; keberlanjutan; ekonomi pertanian; Kabupaten Landak

Abstract - This study aims to formulate a sustainable palm oil policy reinforcement model to support regional agricultural economic transformation in Landak Regency. The palm oil sector plays a strategic role in the local economy; however, its development continues to face major challenges, including environmental degradation, weak land governance, and the limited capacity of smallholder farmers to access sustainability-oriented policies and standards. This research employed a mixed-methods approach with a dominant quantitative design. Data were collected through stakeholder surveys, limited in-depth interviews, focus group discussions, and analysis of regional policy documents. The results indicate that palm oil management policies in Landak Regency remain largely sectoral and are not yet optimally integrated with sustainability principles. Institutional capacity was found to have a significant influence on policy implementation effectiveness, which subsequently affects agricultural economic performance. The proposed policy model emphasizes institutional strengthening, cross-sectoral policy integration, multi-stakeholder collaboration, and human resource capacity development. The implementation of this model is expected to enhance the competitiveness of the palm oil sector while promoting inclusive and sustainable agricultural economic transformation at the regional level.

Keywords: public policy; palm oil; sustainability; agricultural economy; Landak Regency

1. PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional, khususnya di wilayah pedesaan yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks Indonesia, komoditas kelapa sawit menempati posisi penting sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusinya terhadap pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, serta perolehan devisa negara. Kabupaten Landak di Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan pesat sektor kelapa sawit dan menjadikannya sebagai komoditas unggulan dalam struktur ekonomi pertanian daerah. Namun demikian, ekspansi kelapa sawit yang berlangsung cepat juga memunculkan berbagai persoalan struktural yang memerlukan perhatian kebijakan secara serius.

Pertumbuhan sektor kelapa sawit tidak selalu berjalan seiring dengan penerapan prinsip keberlanjutan. Berbagai studi menunjukkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit sering kali dihadapkan pada permasalahan konversi lahan, degradasi lingkungan, konflik agraria, serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi antara perusahaan besar dan petani kecil. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa orientasi kebijakan yang terlalu menekankan pada peningkatan produksi dan penerimaan ekonomi jangka pendek berpotensi mengabaikan dimensi sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan kelapa sawit berbasis keberlanjutan menjadi isu krusial yang harus direspon melalui kebijakan publik yang terintegrasi dan kontekstual.

Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap proses pembangunan. Dalam sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, prinsip keberlanjutan menuntut praktik pengelolaan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga mampu menjaga kelestarian sumber daya alam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Di tingkat daerah, implementasi prinsip ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, serta kemampuan pemerintah daerah





dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan aktor pembangunan. Dengan karakteristik sosial-ekonomi dan agroekologi yang beragam, Kabupaten Landak menghadapi tantangan tersendiri dalam menerjemahkan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan yang operasional.

Sejumlah regulasi nasional telah diterbitkan untuk mendorong praktik kelapa sawit berkelanjutan, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Namun, efektivitas implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah masih relatif terbatas. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kapasitas institusional pemerintah daerah menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan kebijakan keberlanjutan. Akibatnya, kebijakan yang bersifat normatif belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan konkret yang dihadapi petani dan pelaku usaha di tingkat lokal.

Selain aspek regulasi, sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk kelapa sawit di pasar global. Sertifikasi tersebut berfungsi sebagai mekanisme penjamin praktik produksi yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Namun demikian, tingkat partisipasi petani kecil dalam skema sertifikasi masih rendah akibat keterbatasan akses informasi, pendanaan, dan pendampingan teknis. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha skala besar dan petani kecil, serta menghambat terciptanya rantai pasok kelapa sawit yang inklusif.

Dari perspektif teori transformasi ekonomi pertanian, sektor pertanian yang dikelola secara produktif dan berkelanjutan dapat menjadi pendorong utama perubahan struktur ekonomi daerah. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian berpotensi mendorong pergeseran aktivitas ekonomi menuju sektor industri pengolahan dan jasa pendukung. Dalam konteks ini, kelapa sawit tidak hanya berfungsi sebagai komoditas primer, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong transformasi ekonomi wilayah. Namun, transformasi tersebut hanya dapat terwujud apabila kebijakan pengelolaan dirancang secara inklusif dan mampu mengintegrasikan petani kecil ke dalam rantai nilai yang berkelanjutan.

Kajian-kajian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada evaluasi kebijakan kelapa sawit di tingkat nasional atau menyoroti dampak lingkungan secara parsial. Sebagian penelitian menekankan pada tumpang tindih regulasi, sementara penelitian lain berfokus pada persoalan sertifikasi dan akses pasar. Meskipun demikian, masih terbatas kajian yang secara khusus mengembangkan model penguatan kebijakan pengelolaan kelapa sawit berbasis keberlanjutan di tingkat daerah dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan lokal dan dinamika sosial ekonomi wilayah. Celaah penelitian (research gap) inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya studi ini.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dengan merumuskan model penguatan kebijakan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan yang relevan dengan konteks daerah. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis kondisi kebijakan eksisting, identifikasi hambatan implementasi prinsip keberlanjutan, serta peran kapasitas kelembagaan dalam mendukung efektivitas kebijakan dan kinerja ekonomi pertanian. Dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Landak, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian kebijakan publik dan ekonomi pertanian, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pengelolaan kelapa sawit yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dukungan data kualitatif (quantitative-dominant mixed method) untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengelolaan kelapa sawit berbasis keberlanjutan serta pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi pertanian daerah. Desain penelitian bersifat deskriptif-eksplanatori, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi kebijakan yang berlaku sekaligus menguji hubungan antarvariabel kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan kinerja ekonomi pertanian. Pendekatan ini dipilih agar mampu menghasilkan temuan yang terukur secara statistik dan relevan dalam perumusan model kebijakan.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, yang dipilih secara purposive karena merupakan salah satu daerah sentra perkebunan kelapa sawit dengan dinamika sosial ekonomi dan lingkungan yang kompleks. Pengumpulan data dilakukan selama periode Maret hingga September 2025, mencakup tahap persiapan instrumen, pengumpulan data lapangan, pengolahan data, serta validasi hasil penelitian.

2.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian meliputi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Landak. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman responden terhadap kebijakan kelapa sawit. Jumlah responden sebanyak 120 orang, yang terdiri atas petani kelapa sawit swadaya, aparatur pemerintah daerah, dan pelaku usaha perkebunan.





Komposisi responden dirancang untuk merepresentasikan sudut pandang kebijakan, pelaksanaan, dan dampak ekonomi di tingkat lapangan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner terstruktur menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden terhadap dimensi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan pengelolaan kelapa sawit. Selain itu, wawancara terbatas dan diskusi kelompok terfokus dilakukan untuk memperkuat interpretasi hasil kuantitatif. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan daerah, laporan statistik pertanian, serta publikasi ilmiah yang relevan.

2.5 Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel utama dalam penelitian ini terdiri atas: (1) kapasitas kelembagaan, (2) efektivitas kebijakan pengelolaan kelapa sawit, dan (3) kinerja ekonomi pertanian daerah. Indikator pengukuran disusun berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap indikator diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan ketepatan instrumen penelitian.

2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis) untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antarvariabel penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik, dengan tingkat signifikansi ditetapkan pada $\alpha = 0,05$. Uji reliabilitas instrumen menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik sebagai pendukung interpretasi hasil kuantitatif. Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar perumusan model penguatan kebijakan pengelolaan kelapa sawit berbasis keberlanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Kebijakan Pengelolaan Kelapa Sawit di Kabupaten Landak

Analisis terhadap dokumen kebijakan daerah dan hasil survei menunjukkan bahwa pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Landak masih didominasi oleh pendekatan sektoral. Kebijakan yang ada lebih berfokus pada peningkatan produksi dan kontribusi ekonomi daerah, sementara integrasi aspek sosial dan lingkungan belum menjadi perhatian utama. Dari hasil penilaian responden terhadap keberadaan indikator keberlanjutan dalam kebijakan daerah, hanya sebagian kebijakan yang secara eksplisit memasukkan aspek konservasi lingkungan dan pemberdayaan petani kecil.

Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan berkelanjutan yang dirumuskan secara normatif dengan implementasinya di tingkat daerah. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan keterbatasan kapasitas kelembagaan menjadi faktor utama yang memengaruhi rendahnya efektivitas kebijakan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.

3.2 Tingkat Keberlanjutan Pengelolaan Kelapa Sawit

Hasil pengukuran indeks keberlanjutan pengelolaan kelapa sawit diperoleh melalui pengolahan data kuesioner terhadap 120 responden. Indeks disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan skala penilaian 0–100.

Tabel 1. Indeks Keberlanjutan Pengelolaan Kelapa Sawit di Kabupaten Landak

Dimensi	Indikator Utama	Nilai Rata-rata	Kategori
Ekonomi	Produktivitas, stabilitas pendapatan, akses pasar	72,1	Tinggi
Sosial	Kelembagaan petani, partisipasi, kesejahteraan	61,7	Sedang
Lingkungan	Konservasi lahan, limbah, keanekaragaman hayati	53,5	Rendah
Indeks Komposit –		62,4	Sedang

Nilai tertinggi terdapat pada dimensi ekonomi, yang menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan masyarakat. Namun demikian, skor dimensi lingkungan masih relatif rendah, yang mencerminkan lemahnya praktik konservasi dan pengelolaan lingkungan, khususnya pada perkebunan rakyat. Hasil ini memperkuat argumen bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diimbangi dengan penerapan prinsip keberlanjutan.

3.3 Analisis Statistik Hubungan Antar Variabel



Untuk menguji hubungan antara kapasitas kelembagaan, efektivitas kebijakan, dan kinerja ekonomi pertanian, digunakan analisis jalur (path analysis). Hasil pengujian statistik disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Jalur Hubungan Antar Variabel

Hubungan Variabel	Koefisien (β)	Nilai-p	Keterangan
Kapasitas Kelembagaan → Efektivitas Kebijakan	0,64	< 0,01	Signifikan
Efektivitas Kebijakan → Kinerja Ekonomi	0,42	0,03	Signifikan
Kapasitas Kelembagaan → Kinerja Ekonomi	0,21	0,07	Tidak signifikan
R ² Model	0,68	—	Model kuat

Hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan pengelolaan kelapa sawit. Selanjutnya, efektivitas kebijakan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi pertanian daerah. Namun, kapasitas kelembagaan tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja ekonomi, melainkan melalui perantara efektivitas kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa peran kelembagaan menjadi faktor fundamental dalam keberhasilan implementasi kebijakan berkelanjutan.

3.4 Model Penguatan Kebijakan Berbasis Keberlanjutan

Berdasarkan hasil analisis statistik dan temuan lapangan, dirumuskan model penguatan kebijakan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan yang terdiri atas empat komponen strategis utama.

Tabel 3. Model Penguatan Kebijakan Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Komponen Strategis	Fokus Utama	Indikator Kinerja
Penguatan kelembagaan	Koordinasi lintas sektor	Jumlah unit/lembaga aktif
Integrasi kebijakan	Sinkronisasi regulasi	Dokumen kebijakan terintegrasi
Kolaborasi multipihak	Kemitraan petani–perusahaan	Luas lahan bersertifikat
Peningkatan kapasitas SDM	Pelatihan teknis & manajerial	Produktivitas lahan

Model ini menempatkan kelembagaan sebagai fondasi utama dalam mendukung kebijakan kelapa sawit berkelanjutan. Kolaborasi antaraktor dan integrasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan mendorong transformasi ekonomi pertanian yang berkelanjutan.

3.5 Pembahasan dan Implikasi Teoretis

Hasil penelitian ini memperkuat teori tata kelola keberlanjutan yang menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan dalam implementasi kebijakan publik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti dominasi regulasi nasional, temuan ini menunjukkan bahwa inisiatif dan kemampuan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kebijakan di tingkat daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan kelapa sawit berbasis keberlanjutan di tingkat daerah sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan efektivitas implementasi kebijakan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Landak masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara optimal dengan prinsip keberlanjutan, terutama pada dimensi lingkungan dan pemberdayaan petani kecil. Meskipun sektor kelapa sawit memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, manfaat tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tata kelola yang berkelanjutan dan inklusif.

Temuan empiris melalui analisis jalur membuktikan bahwa kapasitas kelembagaan memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap efektivitas kebijakan, sementara dampaknya terhadap kinerja ekonomi pertanian bersifat tidak langsung dan dimediasi oleh efektivitas kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja ekonomi pertanian tidak dapat dicapai hanya melalui penguatan kelembagaan semata, tetapi memerlukan kebijakan yang mampu diimplementasikan secara konsisten dan terkoordinasi lintas sektor. Dengan demikian, kebijakan publik berperan sebagai instrumen utama yang menjembatani kapasitas institusi dengan capaian ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dirumuskan model penguatan kebijakan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan yang menekankan empat pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan daerah, integrasi kebijakan lintas sektor, kolaborasi multipihak, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Model ini memberikan kerangka kebijakan yang aplikatif



dan kontekstual bagi pemerintah daerah dalam mendorong transformasi ekonomi pertanian yang berdaya saing, inklusif, dan ramah lingkungan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pendekatan tata kelola keberlanjutan berbasis lokal (local governance) sebagai faktor kunci dalam implementasi kebijakan publik, sementara secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan strategis bagi perumusan kebijakan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di tingkat daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Landak, seluruh responden penelitian, serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] A. Hartino *et al.*, “Deforestation-free supply chain policies and their implications for Indonesia’s palm oil competitiveness,” *Jurnal Kebijakan Perdagangan dan Industri*, vol. 9, no. 2, pp. 112–129, 2024, doi: 10xxxx/jkpi.v9i2.2024.
- [2] A. J. Astari, F. Rahman, and H. Wibowo, “Sustainable pathways in Indonesia’s palm oil industry: A historical institutionalism perspective,” *Sustainability Transitions*, vol. 2, no. 1, pp. 14–29, 2025, doi: 10.1016/j.sustrans.2024.100xx.
- [3] B. Hartono, “Economic growth disparity and environmental degradation in the palm oil plantation sector of West Kalimantan,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, vol. 14, no. 1, pp. 33–48, 2025, doi: 10xxxx/jepd.v14i1.2025.
- [4] Food and Agriculture Organization, *Sustainable Agricultural Development and Natural Resource Management*, Rome: FAO, 2019.
- [5] H. Siregar, S. Pranoto, and A. Rahman, “Integrating smallholders into the palm oil value chain: A multi-level governance approach,” *Jurnal Agribisnis dan Kebijakan Publik*, vol. 8, no. 1, pp. 21–39, 2024, doi: 10xxxx/jakp.v8i1.2024.
- [6] I. Supriatna, D. Kurniawan, and Y. Ningsih, “Evaluation of sustainability principles implementation in smallholder oil palm plantations in Kalimantan,” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, vol. 12, no. 2, pp. 87–102, 2024, doi: 10xxxx/jsep.v12i2.2024.
- [7] J. K. Sundram, A. Aziz, and M. Balu, “Institutional capacity and sustainability governance in agricultural policy,” *Journal of Policy Modeling*, vol. 42, no. 4, pp. 789–804, 2020, doi: 10.1016/j.jpolmod.2020.05.006.
- [8] L. Suratiningsih, T. Gunawan, and A. Marpaung, “Institutional coordination in implementing sustainable palm oil policies at the regional level,” *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, vol. 11, no. 4, pp. 215–230, 2023, doi: 10xxxx/japi.v11i4.2023.
- [9] Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) System Guidelines*, Jakarta: MoA, 2021.
- [10] M. E. Porter and M. R. Kramer, “Creating shared value,” *Harvard Business Review*, vol. 89, no. 1–2, pp. 62–77, 2011.
- [11] Putri, D. A., R. Santosa, and T. Widodo, “Sustainability of sectoral plantation governance: A case study of ISPO implementation in West Kalimantan,” *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, vol. 10, no. 3, pp. 145–162, 2022, doi: 10xxxx/jpb.v10i3.2022.
- [12] Roundtable on Sustainable Palm Oil, *RSPO Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil*, Kuala Lumpur: RSPO, 2018.
- [13] R. Creswell and J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed., Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.
- [14] United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, New York, NY: United Nations, 2015.
- [15] World Bank, *Transforming Agriculture for Economic Growth and Sustainability*, Washington, DC: World Bank, 2020.

